

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zaenuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Atmo Soedirjo, Prayudi, 2002, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta.
- Basah, Siachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanitijo, Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta.
- Harun, 2009, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Kristiadi, J.B., 1996, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LAN, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- _____, 2007, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S., 1997, *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ngani, Nicom 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Obsorn, David dan Peter Plasterik, 2004, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, PPM, Jakarta.

- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Suharmisi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi IV*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya.
- _____, 1993, *Pengamat Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon Yundika, Surabaya.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- T, Fandy, 1997, *Total Quality Service*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Trimeihardi, Yovi, 2014, *Macam – macam Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Utomo, Warsito, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Y, Sri, dan Pudatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.

KAMUS

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Hasil Pencarian KBBI Daring – Berbuat*”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbuat/> pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 13.27 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Hasil Pencarian KBBI Daring – Pelayanan*”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan> pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 21.32 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Hasil Pencarian KBBI Daring – Pelaksanaan*”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan/> pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 15.35 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Hasil Pencarian KBBI Daring – Wawancara*”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan/> pada tanggal 30 November 2018 Pukul 01.48 WIB.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disahkan dan diundangkan pada 8 Januari 2002 dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048.

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, disahkan pada 29 Desember 2017 dan diundangkan

pada 29 Desember 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2006.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat disahkan dan diundangkan pada 9 Mei 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 616.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2003 dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

Petunjuk Lapangan No. Pol : JUKLAP/02/XXI/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

SKRIPSI

Kaharuddin, 2017, Pelaksanaan Perizinan Keramaian dalam Pelaksanaan Kegiatan Konser Musik di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Rizal, Rimang Kartono, 2017, Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Pemandokan di Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Yudhistira, Tyas, 2017, Pelaksanaan Pemberian Izin Pertandingan Sepakbola di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

WEBSITE

Academia, “Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, diakses dari

- https://www.academia.edu/6768950/IZIN_SEBAGAI_INSTRUMEN_PENGAWASAN_DALAM_MEWUJU_DKAN_PEMERINTAHAN YANG_BAIK, diakses pada tanggal 21 November Pukul 21.40 WIB.
- Caping, “Banyak Negara yang Larang Penerbangan Lampion”, <https://m.caping.co.id/news/detail/1781815>, diakses pada tanggal 28 November 2018 Pukul 19.59 WIB.
- Christianti, Elisabet, Kilas Balik Sejarah Lampion, <http://repository.unika.ac.id/14901/2/11.13.0059%20Elisabet%20Christianti%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 15.12 WIB.
- Docplayer, “Strategi Pengembangan Kuta Lombok Sebagai Destinasi Pariwisata”, <https://docplayer.info/75145603-Strategi-pengembangan-kuta-lombok-sebagai-destinasi-pariwisata-ander-sriwi.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 Pukul 19.10 WIB.
- Hipwee, “Keindahan Itu Ternyata Tak Sepadan dengan Dampaknya”, <https://www.hipwee.com/feature/perayaan-tahun-baru-dengan-lampion-memang-spesial-tapi-ternyata-banyak-negara-yang-sudah-melarang/>, diakses pada tanggal 28 November 2018 Pukul 19.53 WIB.
- Informasipedia, “Daftar Kabupaten Kota di Provinsi di Yogyakarta” <http://informasipedia.com/wilayah-indonesia/daftar-kabupaten-kota-di-indonesia/789-daftar-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober Pukul 17.23 WIB.
- Kebumen, Sorot, “Tak Dapat Izin Penerbangan Seribu Lampion di Pantai Dibatalkan”, <http://kebumen.sorot.co/berita-3268-tak-dapat-izin-penerbangan-seribu-lampion-di-pantai-dibatalkan.html>, diakses pada tanggal 28 November Pukul 20.48 WIB.
- Mansur, T, “Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhoekseumawe”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7131/08E00686.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 21 November Pukul 18.38 WIB.
- Telergraph, The, “Smethwick Blaze Caused by Chinese Lantern 'Could Burn for Days”, <https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/10151959/Smethwick-blaze-caused-by->

[Chinese-lantern-could-burn-for-days.html](#), diakses pada tanggal 28 November Pukul 19.48 WIB.

Today, Wildfire, Sky Lantern May Have Caused Warehouse, <https://wildfiretoday.com/2017/01/02/sky-lantern-may-have-caused-warehouse-fire/>, diakses pada tanggal 28 November Pukul 19.39 WIB.